

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH (LPPD)  
DAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG  
JAWABAN (LKPJ)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan LPPD dan LKPJ ini tetap mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Semoga LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini dapat memberikan peningkatan kinerja Aparatur khususnya pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten tanah Laut mampu melaksanakan tugas pengabdian dan memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Tanah Laut



**Ir. SAHRUDIN**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19661210 199403 1 007**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum.....	1
B. Data Umum Daerah .....	3
1. Data Geografis Wilayah .....	3
2. Jumlah PNS .....	4
3. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	4
<b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....</b>	<b>7</b>
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	7
B. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	19
C. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA sebelumnya.....	20
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>21</b>
A. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	21
1. Indikator Kinerja kunci Keluaran.....	21
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	22
B. Tugas Pembantuan .....	23
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>22</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26B Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan serta;
  - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. Mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Serta memiliki fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26C Ayat (1) dan (2), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Terkait analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

### A. Visi

#### ***“ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi ”***

- Berkarya
- Inovasi
- Tertata
- Religius
- Aktual
- Sinergi

### B. Misi

Visi Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi kabupaten Tanah Laut tahun 2018 - 2023, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

- Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Operasionalisasi tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, Ke 3 dan Ke 5 Yaitu :

***Misi 2. “ Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif ”***

**Misi 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”**

**Misi 5 “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**

**Penjabaran Misi 2 :**

- Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.

**Penjabaran Misi 3 :**

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut

**Penjabaran Misi 5 :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

### **1.3. DATA UMUM DAERAH**

#### **1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH**

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut :

Batas Wilayah

Utara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru

Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan LautJawa

Selatan LautJawa

Barat LautJawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam

empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagian merupakan dataran rendah dan curah hujan yang tidak menentu, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung debit air kiriman dari sungai yang berhulu di Kabupaten Tetangga sehingga mengakibatkan banjir hampir secara rutin setiap tahunnya.

Kondisi sungai yang semakin hari / semakin lama semakin dangkal dan semakin menyempit serta berkurangnya daerah resapan air hal ini berkontribusi meningkatnya debit air. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi akan mengalir kepermukiman maka ruas sungai alamiah kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir, sehinggalpotensi bencana yang seringterjadi di Kabupaten Tanah Laut adalah bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan.

## 2. JUMLAH PNS

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terhitung pada bulan Desember 2022 adalah 17 (Tujuh belas) orang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1  
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2022

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	5	11	-	17	-	6	2	-	9	-	-	17

## 3. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 5.178.307.742,00 meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal Anggaran dan realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :



Jumlah realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Daerah:	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
a. Belanja Pegawai	2.611.858.215,00	2.074.698.592,00	79,43
b) Belanja Modal	338.775.993,00	315.950.325,00	93,26
C. Belanja Barang dan Jasa	1.972.038.740,00	1.626.487.614,00	82,48
Jumlah	4.922.672.948,00	4.017.136.531,00	<b>81,60</b>

**BAB II**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut semula berjumlah Rp. 5.178.307.742,00 berkurang sejumlah Rp. 255.634.794,00 sehingga menjadi Rp 4.922.672.948,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

BPBD tidak melaksanakan pendapatan daerah

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 5.178.307.742,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 255.634.794,00	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 4.922.672.948,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp 4.017.136.531,00)

3. Pembiayaan Daerah

BPBD tidak melaksanakan pembiayaan daerah

**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.089.653,-		
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 646.132,-		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.611.858.215,-		
				2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. 1.964.201,-		
		3	Administrasi umum Perangkat Daerah	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.904.195,-	
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 67.701.363,-	
					3	Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan	Rp. 6.716.193,-	
					4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 145.980.000,-	
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp. 65.001.674,-	
					2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 43.858.450,-	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rp.1.028.692.121

			3	Kantor	,-
		5	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 27.500.000,-
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 217.750.000,-
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 17.225.000,-
2	Program Penanggulangan Bencana	1	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 318.490.000,-
			2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 364.295.776,-
			J U M L A H		Rp. 4.922.672.948,-

1. Capaian Kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
<b>PERJANJIAN KINERJA KEPALA PELAKSANA BPBD</b>					
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	87,55 (Baik)	84,50 (Baik)	96,51 %
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	125 (Sedang)	156,86 (Tinggi)	79,68 %
<b>PERJANJIAN KINERJA KASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>					
2	Meningkatkannya	Jumlah	150	0	0%

	partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	orang		
		Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	25 orang	100%
		Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan Forum PRB	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	0	0
		<b>PERJANJIAN KINERJA KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>			
	Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	6 Jenis	85.72%	
	Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	350 paket	86 Paket	46%	
	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	30 buah	136 buah	273%	
	Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%	
	<b>PERJANJIAN KINERJA KASI REHABILITASI DAN REKONTRUSKI</b>				
	Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	0	0	
	Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%	
Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	0	0		
<b>PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT</b>					
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%

organisasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	23 buah	23 buah	90%
	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	2 Pameran	50%
	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	71,93 BB	100%

2. Capaian Kinerja keluaran masing masing sub kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan beserta permasalahannya

Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 682.785.776,00 terealisasi sebesar Rp. 373.032.325,00 atau 54,63% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

a).Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 682.785.776,00 terealisasi sebesar Rp. 373.032.325,00 atau 54,63% dengan sub kegiatan :

- 1) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 318.490.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.010.000,00 atau 16,33%
- 2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 364.295.776,00 terealisasi sebesar Rp. 321.022.325,00 atau 88,12%

Analisa Program dan Kegiatan masih belum terealisasi belum maksimal yaitu (60%). Diakibatkan beberapa hal yaitu:

1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota tidak tercapai 100%

a) Pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Belanja makan dan minuman Aktivitas Lapangan ini berkaitan dengan Penanganan Bencana Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, untuk penanganannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut

Nomor : 188.45 /871 – KUM / 2022 tanggal 30 Juni 2022 Tentang Penetapan Status Siaga Penanganan Bencana Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut 2022, yang ditetapkan selama 152 (seratus lima puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 s/d 30 November 2022. Walaupun berdasarkan Buletin Iklim/Cuaca dari BMKG pada bulan Juli 2022 diperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022, namun masih di sertai adanya hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dengan hal tersebut maka penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan melalui pos induk BPBD Kabupaten Tanah Laut, tidak mendirikan pos komando dan pos lapangan di Kecamatan, sehingga belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan tidak bisa di realisasikan dan perlu juga kami sampaikan berdasarkan Rekapitulasi Data Kejadian Bencana yang tercatat di Pusdalops PB BPBD Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 Januari 2022 s/d 21 Desember 2022 untuk jenis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hanya terjadi 9 (sembilan) kali kejadian.

b). Pada Rekening Belanja Penanganan Bencana

Belanja ini digunakan untuk pembayaran personil TRC/RESCUE, Pusdalops PB dan Relawan pada setiap terjadinya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/33-KUM/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Besaran Honorarium Tim Operasional Penanganan Bencana BPBD Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022. Untuk pembayaran Honorarium personil penanganan bencana ini dibayarkan kepada setiap personil TRC/Rescue, Pusdalops PB dan Relawan sesuai dengan jumlah kegiatan bencana yang di tangani jadi realisasinya sangat tergantung kepada jumlah kejadian

3. Analisa Kesuaian antara sub kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana</li> <li>• Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan 1 Bidang Urusan	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan 1 Bidang Urusan	-		
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 13 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 13 Dokumen	-		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen	-		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan			



<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22 Dokumen</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22 Dokumen</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17 PNS	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17 PNS			
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 5 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 5 Dokumen			
<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi umum Perangkat Daerah</b>			

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket			
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan	Jumlah Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan			

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 12 Laporan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Laporan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan			

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 14 Unit	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 14 Unit			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Jenis	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Jenis			
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana</b>	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana</b>			

			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 44 Hari	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 44 Hari	Untuk Pembayaran insentif personil penanganan bencana sangat tergantung pada jumlah kejadian bencana yang tertangani	Lebih baik ada dana untuk penanganan dari pada tidak tersedia	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota 8 Jenis	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota 8 Jenis	Potensi Bencana yang sulit untuk di prediksi sehingga Logistik Kebutuhan dasar kepada warga yang terdampak bencana tidak dapat dipenuhi secara maksimal	Di Harapkan untuk Anggaran Pemenuhan Logistik (Keperluan dasar ) agar dapat dipenuhi sesuai dengan Keperluan	

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 adalah keputusan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis untuk menanggulangi bencana baik bencana alam (Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan) serta bencana non Alam (Penetapan status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kebijakan strategis tersebut yaitu :

**Tabel 3.1 Kebijakan Strategis yang diambil Dalam Satu Tahun Anggaran**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pembentukan Tim Operasional Penanganan bencana BPBD Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 4-KUM/2022	Uraian Tugas Tim Operasional Penanganan Bencana
2	Besaran Honorarium Tim Operasional Penanganan bencana BPBD Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 188.45/33-KUM/2022	Honorarium penanganan bencana per orang / kejadian, maksimal penanganan di laksanakan sebanyak 17 orang berdasarkan surat Tugas.
3	Penetapan Status Siaga Penanganan Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 188.45/871-KUM/2022	Penetapan Status Siaga dalam rangka pencegahan terjadinya Karhutla dan kabut asap yang ditimbulkannya serta mengantisipasi dampak bencana kekeringan di Kabupaten Tanah Laut.
4	Penetapan Status Siaga Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 188.45/872-KUM/2022	Penetapan Status Siaga dalam rangka pencegahan terjadinya penyakit mulut dan Kuku di Kabupaten Tanah Laut.
5	Pembentukan Pos Komando dan Pos Lapangan serta penunjukan satuan tugas siaga Penanganan Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 188.45/952-KUM/2022	Susunan Personil dan uraian Tugas Pos Komando Siaga penanganan terjadinya Karhutla di Kabupaten Tanah Laut.
6	Penetapan Perpanjangan ketiga status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Banjir	Keputusan Bupati Nomor 188.45/486-KUM/2022	Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut selama 120 Hari (20 Februari s/d 19 Juni 2022)

	dan Tanah Longsor di Kab. Tanah Laut		
--	--------------------------------------	--	--

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2022 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan type SKPD terkait type A	Telaah Staf tentang Perubahan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut	Bupati Setuju tapi diteruskan ke Bagian Organisasi Propinsi dan belum disetujui
2.	Menyediakan Gudang kantor BPBD	Telaah Staf tentang Penambahan Pagu Tahun Anggaran 2022	Setuju dan akan akomodir pada tahun 2023
3.	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	Upaya dan Mitigasi Bencana/Latihan Resque	Melalui Pelatihan yang masuk di sub kegiatan Pelatihan dan Mitigasi Bencana



**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN**  
**TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

**A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan gambaran dari keberhasilan SKPD dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana. Laporan capaian kinerja ini memuat data/informasi kinerja setiap urusan kebencanaan sesuai dengan indikator masing-masing urusan. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh BPBD sebagai berikut :

**A. 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

A.1.1 Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	IKK OUTCOME	N O	IKK OUTPUT	INDIKATO R	SUMBE R DATA	KET
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	358.170 Jiwa 100%	BPBD	Informasi (himbauan) dari Bupati Tanah Laut tentang Waspada Cuaca Ekstrem di Kab. Tanah Laut
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal	100%	BPBD	Fc Perbup Terlampir
		2	Persentase sejumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	71 orang 100%	BPBD	Dana dari RSIA (dari Pihak ke 3) Pelatihan Penanganan Bencana

3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	FC PoskoTanggapDarurat,	SK
		2	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	Jumlah Tenaga Penanganan Bencana sebanyak 56 Orang	
		3	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD		

#### A. 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

**Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil**

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	358.170 Jiwa	BPBD	
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.216 orang	BPBD	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56160 Jiwa	BPBD	

## **B. TUGAS PEMBANTUAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat, kabupaten lain dan Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan berdasarkan indikator input berupa sumber dana adalah 81,60% di mana dari jumlah anggaran sebesar Rp **4.922.672.948,00,-** realisasinya sebesar Rp **4.017.136.531,00,-**. Dengan pencapaian kinerja 81,60% pada sasaran ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong pada Kategori Baik, hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut semoga sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2022 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Pelaihari, Januari 2022

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**



**Ir. SAHRUDIN  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19661210 199403 1 007**



